



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Triwulan IV 2024



BPPMHKP BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, keridhaan dan karunia-Nya sehingga Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta menyusun Laporan SKM Triwulan III Tahun 2024 ini.

Kegiatan Survei Kepuasan masyarakat ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari SKIPM Bandung. Pengukuran ini akan dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi harapan masyarakat khususnya pengguna jasa kami. Selain itu juga SKM dilakukan untuk memenuhi kewajiban SKIPM Bandung sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, yakni melakukan pengukuran terhadap kepuasan masyarakat pengguna jasa dan mempublikasikan hasil pengukuran tersebut.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui *e-survey* yang selanjutnya diolah untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM merupakan tolak ukur kualitas pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan persepsi dan penilaian masyarakat. Selanjutnya dari nilai tersebut dijadikan dasar sebagai tindakan perbaikan maupun peningkatan dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan yang berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini, terutama kepada pengguna jasa layanan SKIPM Bandung. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Cinahi, 02 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Bandung



Agung Gede E.S, S.Pi., M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Pengertian Umum	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Manfaat.....	4
II. PENGUMPULAN DATA SKM	5
2.1. Waktu dan Tempat	5
2.2. Tahapan Kegiatan Survei.....	5
III. HASIL SURVEI	10
3.1. Jumlah Responden Data SKM	10
3.2. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan	Error! Bookmark not defined.
IV. ANALISA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	12
4.1. Analisa Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	12
4.2. Reviu Hasil Survei dengan Hasil Periode Sebelumnya	12
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	13
V. HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	13
5.1. Permasalahan	13
5.2. Tindakan Perbaikan Yang Telah Dilakukan	14
VI. PENUTUP	16
6.1. Kesimpulan.....	16
6.2. Saran.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Survei.....	5
Gambar 2. Pengambilan Informasi Data Responden.....	7
Gambar 3. Nilai Per Unsur Triwulan IV 2024 SKIPM Bandung.....	11
Gambar 4. Perbandingan Nilai IKM Triwulan III TA. 2024 dan Triwulan IV TA. 2024	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Unsur Penilaian	7
Tabel 2. Tabel Mutu Pelayanan.....	9
Tabel 3. Data Responden SKM Triwulan IV TA. 2024.....	10
Tabel 4. Perhitungan Nilai IKM Triwulan IV 2024	11

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas sebagai perwakilan SKIPM di daerah Jawa Barat. Salah satu tugas SKIPM Bandung yaitu melakukan kegiatan layanan sertifikasi terhadap lalu lintas perikanan dibidang ekspor, impor, dan antar area (domestik) yang melalui wilayah kerja SKIPM Bandung. Kegiatan layanan tersebut telah terstandarisasi oleh ISO 9001:2015 yang memprioritaskan kualitas pelayanan, sehingga dalam melakukan kewajiban pelayanan tersebut SKIPM Bandung harus mengutamakan kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan untuk mengetahui persepsi dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan SKIPM Bandung terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. Survei harus dilakukan menggunakan metodologi yang seragam pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik agar hasil yang dihasilkan valid dan dapat mewakili keadaan sebenarnya.

Hasil survei dan indeks kepuasan masyarakat dapat dijadikan dasar/bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan yang mendorong pada peningkatan mutu pelayanan. Selain itu evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus merupakan salah satu upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pengguna jasa.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Pelayanan Publik;

- c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2023 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu :

- 1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil Pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4;
- 3. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan;
- 4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur- unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 bulanan (triwulan), atau enam bulanan (semester) atau minimal 1 tahun sekali;
- 6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintahan atau non pemerintahan yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan

akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survey. Misalnya lembaga penelitian yang ada pada universitas/ perguruan tinggi;

7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan, tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintahan dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;
9. Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan;
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang ada pada saat pencacahan pelayanan publik yang pada saat pencacahan berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan;
12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah
14. Instansi pemerintah adalah instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung. Adapun tujuan survei kepuasan masyarakat adalah untuk:

1. Mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Memantau kinerja unit pelayanan secara berkala;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Menjaga kinerja pelayanan publik di SKIPM Bandung.

1.5. Manfaat

Pelayanan publik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan penyelenggaraan layanan publik. Selanjutnya hasil yang didapatkan akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal perbaikan kualitas pelayanan. Pelayan publik juga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan menciptakan upaya-upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan secara maksimal, sesuai dengan prosedur pelayanan dan janji layanan. Dalam memberikan pelayanan tersebut setiap personil memiliki kompetensi yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

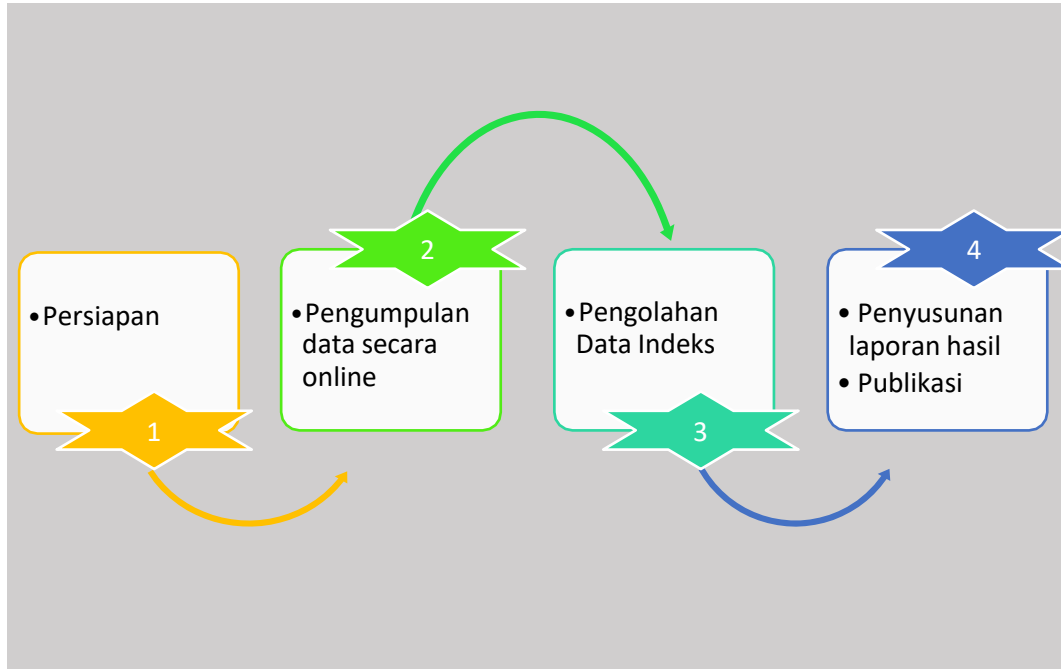
II. PENGUMPULAN DATA SKM

2.1. Waktu dan Tempat

Kegiatan survei kepuasan masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan secara *online* / *e-survei* pada tanggal Oktober - Desember 2024 oleh tim pelayanan SKIPM Bandung.

2.2. Tahapan Kegiatan Survei

Metode Pengumpulan data dilaksanakan melalui survei kepada pengguna jasa yang melakukan kegiatan lalu lintas perikanan dan mendapatkan layanan dari SKIPM Bandung. Petugas akan mengarahkan objek survei untuk mengakses link <https://ptsp.kkp.go.id> atau barcode yang mengarahkan pada website SUSAN KKP. Didalam website tersebut terdapat beberapa pertanyaan mengenai kegiatan layanan. Data yang didapat kemudian dihitung melalui menu admin UPT untuk mendapatkan nilai IKM. Survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Survei

a. Persiapan

Persiapan dilakukan dengan menentukan jenis layanan pada aplikasi Susan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pada instansi SKIPM Bandung terdapat 3 (tiga) jenis layanan yang menjadi target survei, yaitu

- i. Pelayanan Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor): Layanan Sertifikat Produk Perikanan/*Health Certificate for Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah NKRI; Layanan Sertifikat Produk Perikanan/*Health Certificate Fishery Products* berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan Layanan Sertifikat Produk Perikanan/*Health Certificate for Fishery Products* berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.
- ii. Pelayanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/HACCP).
- iii. Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (*Approval Number*).

Berdasarkan data lalu lintas perikanan yang ada di SKIPM Bandung, diperoleh jumlah responden pengguna jasa yang menerima layanan SKIPM Bandung pada periode Triwulan IV 2024 adalah sebanyak 25 orang.

b. Pengumpulan data

Tahap survei selanjutnya ialah pengumpulan data secara online yakni melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/91..> Pengguna jasa diminta untuk mengisi data informasi responden yang terdiri dari

1. Nama Perusahaan / Pelanggan
2. Jenis Usaha
3. Jenis Kelamin
4. Usia
5. Pendidikan
6. Pekerjaan

Gambar 2. Pengambilan Informasi Data Responden

Selanjutnya responden memberikan penilaian terhadap 9 unsur layanan yang diberikan oleh SKIPM Bandung, yang terdiri dari :

1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Prosedur pelayanan
3. Kesesuaian Jangka Waktu Layanan
4. Kesesuaian Biaya
5. Kesesuaian Produk Layanan
6. Kecepatan Respon/Kompetensi Pelayanan
7. Kemudahan dalam Penggunaan Fitur Layanan
8. Layanan Konsultasi dan Pengaduan
9. Kualitas isi/Konten Aplikasi Sistem Layanan

Setiap unsur pelayanan diberikan penilaian skala 1-4 dengan kategori seperti pada Tabel 1. berikut ini :

Nilai	Kategori
1	Tidak Sesuai
2	Kurang Sesuai
3	Sesuai
4	Sangat Sesuai

Tabel 1. Kategori Unsur Penilaian

c. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan hasil kegiatan survei kepuasan masyarakat dilakukan analisis data untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM dihitung dari nilai total rata-rata tertimbang dari seluruh unsur uraian pertanyaan dikonversikan dengan nilai dasar 25, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100. Nilai maksimal indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah sebesar 100 dari nilai maksimal setiap unsur pelayanan sebesar 4 (Sangat Sesuai). Adapun rumus untuk perhitungan IKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata (NRR) per unsur

Yang pertama dilakukan adalah menjumlahkan seluruh nilai per unsur dan masing-masing total nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuisioner yang diisi.

$$NRR \text{ Per Unsur} = \frac{\sum \text{Nilai per Unsur}}{\sum \text{kuisioner yang terisi}}$$

2. Nilai rata-rata tertimbang per unsur

Setelah didapatkan NRR kemudian dikalikan dengan faktor pengali 0,111 yang didapatkan dari 1 per 9 unsur untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur.

$$\text{Faktor Pengali} = \frac{1}{9}$$

$$NRR \text{ tertimbang Per Unsur} = NRR \text{ per Unsur} \times \frac{1}{9}$$

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya hasil NRR tertimbang dikalikan dengan angka 25 untuk memudahkan interpretasi skala 25 – 100. Maka dapat diketahui nilai IKM dari kegiatan survei kepuasan masyarakat

$$\text{Nilai IKM} = \sum NRR \text{ tertimbang} \times 25$$

Setelah nilai IKM diatas telah diketahui, kemudian bandingkan dengan Tabel Mutu Pelayanan dan kinerja Unit Pelayanan berikut ini:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 2. Tabel Mutu Pelayanan

III. HASIL SURVEI

3.1. Jumlah Responden Data SKM

Objek survei/responden merupakan pengguna jasa yang mendapatkan layanan jasa karantina SKIPM Bandung pada periode Triwulan IV 2024. Pada periode ini terdapat 25 orang responden yang memberikan penilaian / respon, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	Pria	10 orang
		Wanita	15 orang
2.	Pendidikan	S1	7 orang
		D3	8 orang
		SMA	10 orang
3.	Kelompok Usia	< 25 tahun	7 orang
		25 – 45 tahun	17 orang
		46 s.d 60 tahun	1 orang
4.	Jenis Layanan	Ekspor	7 orang
		HACCP	6 orang

Tabel 3. Data Responden SKM Triwulan IV TA. 2024

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Nilai IKM SKIPM Bandung pada Triwulan IV Tahun 2024 seperti pada tabel berikut :

10 ▾	entries per page	BANDUNG				
Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2024	4	4.60	95.44	25

Showing 1 to 1 of 1 entries

Nilai IKM yang didapatkan oleh SKIPM Bandung pada Triwulan IV 2024 sebesar 95,44 dengan kualifikasi mutu pelayanan Sangat Baik, dengan rincian

per unsur layanan sebagai berikut :

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2024	4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	19	3.95	3.84	3.68	4.00	3.89	3.68	3.74	3.74	3.79	3.81	95.32
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2024	4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar)	3	4.00	4.00	3.33	4.00	4.00	3.67	3.67	3.67	3.67	3.78	94.44
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2024	4	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/ HACCP)	3	4.00	4.00	3.67	3.67	4.00	4.00	3.67	4.00	4.00	3.89	97.22

Gambar 3. Nilai Per Unsur Triwulan IV 2024 SKIPM Bandung

Unsur	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NRR Per Unsur	3.98	3.94	3.56	3.88	3.96	3.78	3.69	3.80	3.81
NRR Tertimbang	0.44	0.44	0.39	0.43	0.44	0.42	0.41	0.42	0.42
Nilai IKM	95.44								
Mutu Pelayanan	A (Sangat Baik)								

Tabel 4. Perhitungan Nilai IKM Triwulan IV 2024

Kegiatan Survei dilakukan terhadap 25 orang responden dengan membagikan *link* terhadap responden. Nilai IKM yang didapatkan oleh SKIPM Bandung Triwulan IV 2024 sebesar 95.44 dengan kualifikasi mutu pelayanan **Sangat Baik**.

IV. ANALISA HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

4.1. Analisa Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berikut adalah hasil interpretasi responden terhadap unsur layanan SKIPM Bandung :

Unsur dengan Nilai Terbesar :

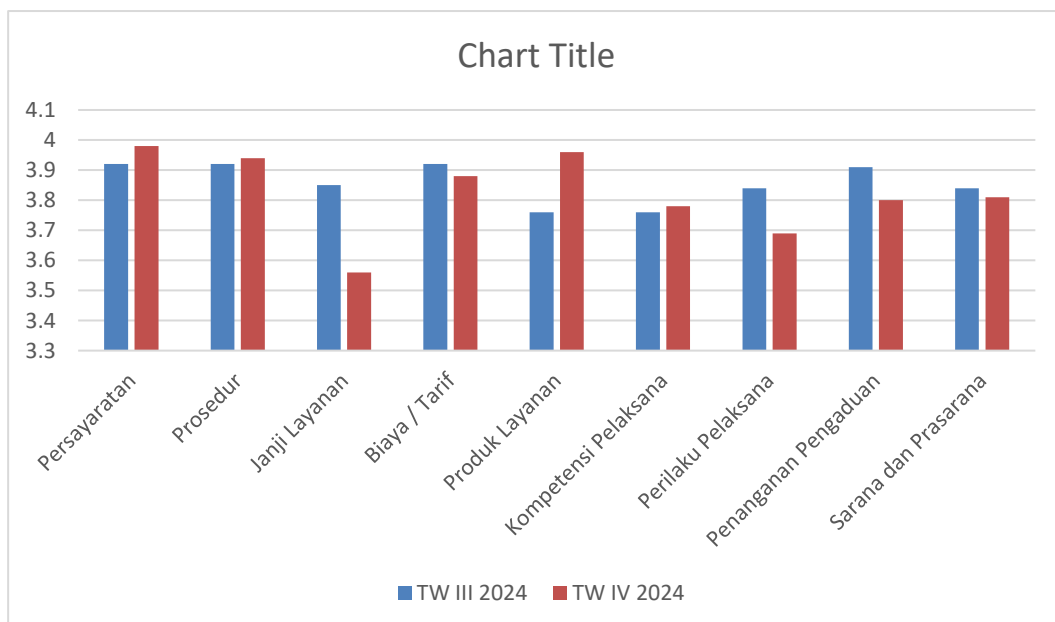
1. Unsur 1 Kemudahan Persyaratan sebesar 3.98
2. Unsur 2 Kesesuaian Prosedur pelayanan sebesar 3.94
3. Unsur 8 Penanganan pengaduan 3.91

Unsur dengan Nilai Terkecil :

1. Unsur 3 Janji Layanan 3.56
2. Unsur 7 Perilaku Pelaksana 3.69

4.2. Reviu Hasil Survei dengan Hasil Periode Sebelumnya

Reviu hasil survei dilakukan dengan membandingkan hasil survei pada periode saat ini dengan hasil pada periode triwulan sebelumnya. Nilai Indeks kepuasan masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2024 SKIPM Bandung ialah sebesar 95.44 dengan kualifikasi Sangat Baik. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 96.58 terjadi penurunan nilai IKM. Adapun perbandingannya seperti pada tabel 4 berikut:



Gambar 4. Perbandingan Nilai IKM Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2024

Dibandingkan dengan sebelumnya Periode Triwulan III 2024, pada Periode Triwulan IV 2024 ini terjadi penurunan di unsur pelayanan terutama Janji Layanan dan Perilaku Pelaksana.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Kualitas pelayanan yang baik harus dipertahankan dan dipantau agar tidak mengalami penurunan, unsur dengan nilai IKM terkecil adalah unsur produk pelayanan dan kompetensi pelaksana, sehingga perlu dilakukan *maintenance* dari tim pelayanan SKIPM Bandung dengan rencana sebagai berikut

No.	Prioritas Unsur	Penyebab	Program/Kegiatan Penyelesaian	Penanggung -jawab
1	Janji Layanan	Penurunan informasi terkait antar pelaku usaha	Melakukan sosialisasi sistem layanan, waktu layanan dan persyaratan layanan terhadap petugas layanan	Isep Wahyudin
2	Perilaku Pelaksana	Kurangnya refreshment petugas layanan	Dilakukan kembali BIMTEK pelayanan publik pada petugas	Isep Wahyudin

V. HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

5.1. Permasalahan

Nilai IKM Periode Triwulan III 2024 dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan SKIPM Bandung yang mengalami penurunan telah dilakukan peningkatan dengan menghasilkan kualifikasi Sangat Baik. Setelah diketahui adanya peningkatan atau penurunan nilai dengan membandingkan nilai SKM Triwulan yang dievaluasi (Triwulan III TA. 2024) dengan Triwulan sebelumnya (Triwulan II TA. 2024).

Dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap unsur yang mengalami penurunan. Seperti disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kesesuaian Persyaratan	<i>Update</i> informasi terbaru pada media sosial dan ruang layanan	Isep Wahyudin
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	<i>Update</i> informasi terbaru pada media sosial dan ruang layanan, Melakukan sosialisasi dan membuat flayer kemudahan prosedur pelayanan	Isep Wahyudin
3	Kesuaian Jangka Waktu Pelayanan	<i>Update</i> informasi terbaru pada media sosial dan ruang layanan	Isep Wahyudin
4	Kesuaian Biaya	<i>Update</i> informasi terbaru pada media sosial dan ruang layanan	Isep Wahyudin
5	Kesesuaian Produk Layanan	<i>Update</i> informasi terbaru pada media sosial dan ruang layanan	Isep Wahyudin
6	Kecepatan Respon/Kompetensi Pelayanan	Mengikuti pelatihan tentang pelayanan sertifikasi baik eksternal maupun internal	Isep Wahyudin
7	Perilaku Pelaksana	Melakukan sosialisasi	Isep Wahyudin
8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Update informasi terbaru mengenai alur pengaduan pada media sosial dan ruang layanan	Isep Wahyudin
9	Sarana dan Prasarana	Memastikan fasilitas pelayanan dalam kondisi baik	Isep Wahyudin

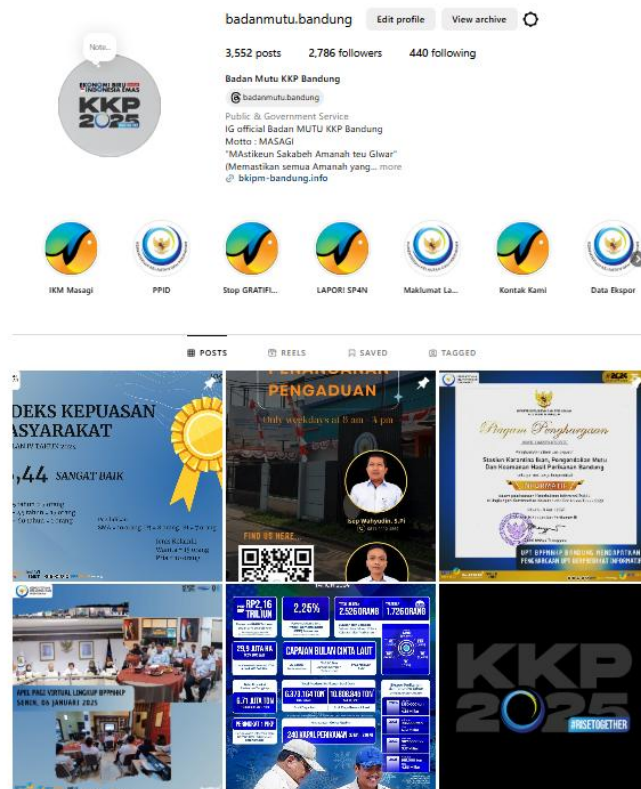
5.2. Tindakan Perbaikan Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisa data interpretasi responden didapatkan 2 unsur layanan yang mengalami penurunan. Dari permasalahan tersebut tim Penanggung jawab kegiatan layanan telah memberikan tindakan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKM pada Triwulan IV, adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan refreshment dan peningkatan kompetensi petugas



b. Menginformasikan pelayanan melalui sosial media.



VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Setiap penyelenggara layanan wajib memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, sehingga persepsi/harapan masyarakat terhadap layanan dapat terpenuhi. Melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat diketahui nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKIPM Bandung sebesar 95.44 pada Periode Triwulan IV TA. 2024. Hal itu menunjukkan peningkatan dari nilai IKM triwulan sebelumnya, akan tetapi peningkatan kualitas layanan harus tetap dilakukan agar dapat menjaga performa pelayanan tetap baik. Selain itu, diharapkan adanya inovasi yang menjadikan pelayanan lebih efisien dan tepat sasaran.

6.2. Saran

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh SKIPM Bandung, dilakukan *maintenance* diantaranya :

1. Memberikan pelatihan/Bimbingan teknis kepada petugas layanan mengenai pelayanan publik baik secara internal maupun pada kegiatan pusat.
2. Mencegah penurunan penilaian terhadap seluruh unsur-unsur layanan dengan memberikan pelayanan prima kepada Pengguna Jasa Layanan.